BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) UU No. 71 tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari *dual basis* menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015.

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik karena standar akuntansi pemerintahan juga diperlukan penyajian laporan keuangan yang memadai yang dapat mengontrol agar penyajian laporan keuangan memenuhi tujuan, yaitu laporan yang informative dan dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya, maka pada waktu menyusun perencanaan, dan penyajian laporan keuangan harus menyesuaikan dengan klasifikasi pada laporan keuangan Negara atau daerah. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana kegiatan standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan di

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah maka penyusun dalam menusun laporan ini penulis tertarik untuk mengambil judul

"TINJAUAN ATAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG"

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Tujuan lain yang hendak dicapai dalam kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dalam penggunaan aplikasi SIMDA keuangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kerja praktek ini diharapkan member manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukan, adapun manfaatnya :

1) Bagi Penulis

   Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kota Bandung.

2) Bagi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kota Bandung

   Diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar dapat menetapkan kebijaksanaan baru dalam pengerahan keuangan pemerintahan sehingga dapat meningkatkan sumber dana yang dapat dihimpun serta selektif dalam menempatkan dana tersebut pada bidang usaha yang produktif.

3) Bagi Pihak Lainnya

   Diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.

1.4 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek diaksanakan selama 1(satu) bulan atau 30 hari, yaitu pada :

Tanggal : 30 Juli 2015 s/d 03 September 2015.

Tempat : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Alamat : Jl. Caringin 103 Bandung

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek

Waktu kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1. Tahap persiapan a. Mendapatkan surat izin KP dari kampus b. Mengajukan tempat untuk KP								
2. Tahap pelaksanaan kerja praktek di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah								
3. Tahap pelaporan a. Menyiapkan data-data laporan KP								
b. Bimbingan								
c. Sidang Laporan KP								